

TAJUK RENCANA

Siapkan Sarana Mudik dengan Baik

LIBUR panjang lebaran 2022 segera tiba. Keputusan mengenai cuti Bersama juga sudah ditetapkan, yaitu 29 April, serta 4-6 Mei 2022. Sedang libur nasional Idul Fitri 1443 H tanggal 2 dan 3 Mei. Dengan demikian, mulai Jumat 29 April sampai Jumat 6 Mei, ditambah Sabtu 7 Mei dan Minggu 8 Mei 2022 adalah libur sangat Panjang, karena seminggu lebih dan ini belum pernah terjadi.

Karena itu bisa diprediksi, masyarakat yang merantau akan ramai-ramai mudik ke kampung halaman masing-masing. Akan terjadi lonjakan pemudik yang sangat signifikan. Apalagi sudah dua kali lebaran ada larangan mudik, meski secara diam-diam ada juga yang *mbolos*, karena ada yang merasa mudik merupakan hal yang 'wajib'. Mayoritas perantau mudik dari ibukota Jakarta. Selain itu juga ada yang dari kota-kota lain, meski tidak begitu dominan.

Agar kegiatan massal masyarakat ini berjalan lancar dan tidak ada halangan apapun di perjalanan, sehingga bisa sampai tempat tujuan dengan aman, maka sarana dan infrastruktur yang diperlukan perlu dipersiapkan secara baik. Apakah berupa jalan yang akan dilewati, maupun armada yang akan dipakai masyarakat, baik armada angkutan darat, udara maupun laut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan jajarannya untuk mempersiapkan penyelenggaraan mudik Idul Fitri 1443 Hijriyah/2022 Masehi dengan baik serta mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik (KR, Kamis 7/4). "Presiden telah berpesan agar disiapkan dengan matang oleh seluruh kementerian terkait dan lembaga terkait, mengingat berdasarkan proyeksi atau prediksi dari hasil survei Kementerian Perhubungan, angka yang akan melaksanakan mudik berkisar 76 juta-86 juta warga Indonesia, yang akan melaksanakan mudik Idul Fitri setelah dua tahun absen tidak ada mudik," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai rapat terbatas dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (6/4).

Mayoritas pemudik menggunakan

angkutan bus, baik secara berombongan maupun sendiri-sendiri menggunakan sarana transportasi antar kota antar provinsi (AKAP). Karena semua bus yang beroperasi harus benar-benar dipastikan kelaikannya. Kementerian perhubungan dan pihak-pihak terkait perlu memantau kondisi bus-bus yang beroperasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi sudah mengeluarkan imbauan agar masyarakat lebih jeli lagi dalam memilih angkutan. Caranya dengan mengecek portal Sistem Perizinan Online Angkutan dan Multimoda atau SPIONAM.

Kehadiran SPIONAM sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat sekaligus untuk mencegah maraknya angkutan ilegal yang beroperasi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam SPIONAM dicantumkan kapan masa berlaku uji kendaraannya, juga masa berlaku kartu pengawasannya. Juga dapat diperiksa keabsahan angkutan barang, angkutan orang dalam trayek, maupun angkutan orang tidak dalam trayek apakah kendaraan tersebut telah terdaftar atau tidak.

Selain menggunakan armada umum, pasti banyak juga pemudik menggunakan kendaraan pribadi. Di samping kendaraan harus dipastikan kondisinya bagus, jalan yang dilewati juga harus baik. Hanya masalahnya masih ada sejumlah jalan yang terdapat lobang-lobang. Apalagi pada musim hujan ini. Karena itu pihak-pihak terkait mestinya segera memperbaiki jalan-jalan yang bisa membahayakan penggunaannya. Untuk mendukung kelancaran, pihak-pihak lain yang terkait juga perlu bersiap diri, misalnya bengkel, relawan dan juga aparat kepolisian. Termasuk antisipasi di titik-titik yang rawan kemacetan.

Pendek kata, seluruh lapisan masyarakat bisa benar-benar *happy* saat merayakan lebaran nanti. Para pemudik bisa aman dan nyaman selama di perjalanan, baik saat pulang maupun balik. Mereka juga bisa bahagia saat berkumpul dengan sanak keluarga. Kiranya masih ada waktu untuk melakukan berbagai persiapan guna menciptakan suasana bahagia tersebut. □

Tantangan Moderasi Beragama

PADA penghujung jabatannya sebagai Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin memasukkan kebijakan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024). Kementerian Agama (Kemenag) saat itu juga menerbitkan buku 'Tanya Jawab Moderasi Beragama' (2019). Karya yang dikemas layaknya buku saku ini berisi soal-jawab seputar moderasi beragama. Karena itu, dapat dikatakan bahwa program moderasi beragama merupakan warisan berharga Kemenag periode 2014-2019.

Kemenag periode Fachrul Razi (2019-2020) dan Yaqut Cholil Qoumas (2020-sekarang) secara konsisten menjadikan moderasi beragama sebagai perhatian utama. Moderasi beragama penting untuk mengkonter semua bentuk ekstremisme benuansa keagamaan. Komitmen ini menunjukkan moderasi beragama telah menjadi alternatif dalam penanganan ekstremisme dengan segala ekspresinya. Bahkan, banyak pihak berharap moderasi beragama dapat menggantikan program deradikalisasi.

Pendekatan Kekuasaan
Program deradikalisasi dinilai terlalu sering menggunakan pendekatan kekuasaan, bahkan kekerasan, dengan persenjataan lengkap aparat Tim Denus 88 Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dampaknya, program deradikalisasi lebih banyak menghadirkan ketakutan, stigma negatif, dan perasaan traumatik bagi keluarga terduga teroris. Sedang program moderasi beragama menawarkan konsep yang lebih manusiawi dan dialogis dalam mengkonter radikalisme.

Karena itulah semua ikhtiar dalam rangka penyemaian nilai-nilai moderasi beragama penting digelorkan di tengah-tengah kehidupan umat. Komitmen itu penting karena semua agama sejatinya mengajarkan jalan tengah dari dua ekstremitas. Menurut ajaran Islam, misalnya, umat dilarang untuk berperilaku melampaui batas alias ekstrem dalam beragama (QS. al-Nisa': 171 dan al-Maidah: 77). Pada bagian lain, Alquran juga memerintahkan pentingnya menjadi umat menengah (QS. al-

Biyanto

Baqarah: 143).

Kata umat menengah (*wasathiyah*) secara luas dipahami sebagai landasan teologis pentingnya menyemai nilai-nilai moderasi beragama. Tetapi harus diakui, penyemaian nilai-nilai moderasi beragama kini mulai menghadapi tantangan. Sebagian pihak mencurigai program moderasi beragama sebagai bentuk pendangkalan akidah umat. Apalagi secara demonstratif, publik



moderasi beragama itu penting diluruskan agar tidak menimbulkan perdebatan di kalangan umat. Itu karena moderasi sangat menekankan pentingnya posisi tengahan. *Wasathiyah* penting untuk menjauhkan umat dari ekstremisme dalam beragama. Posisi tengahan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak ini merupakan substansi ajaran moderasi beragama.

Untuk itulah para pengkritik moderasi beragama penting memahami bahwa yang dimoderasi sejatinya bukan agamanya. Itu karena agama bersumber dari wahyu, yang tidak mungkin diperluas atau dipersempit. Yang dimoderasi adalah pemikiran, pemahaman, atau penafsiran umat terhadap ajaran agama untuk diselaraskan dengan tantangan zaman.

Pada konteks inilah nilai-nilai moderasi penting terus disemai agar pada saatnya umat menampilkan wajah beragama yang lebih ramah terhadap keragaman, bukan wajah yang penuh amarah. Pembumian nilai-nilai moderasi beragama telah mewujud dalam berbagai bentuk, seperti desa sadar kerukunan, kemah pemuda lintasagama, dialog lintasiman, komunitas perempuan lintasagama pelopor ekonomi kreatif, serta pentas seni budaya dan olahraga lintas-etnis dan agama.

Tugas semua elemen *civil society* adalah membumikan nilai-nilai moderasi beragama dalam bentuk pertemuan-perjumpaan informal lintas-etnis, budaya, dan agama. □

**) Prof Dr Biyanto, Guru Besar UIN Sunan Ampel dan Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Timur*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Mengkritisi Kebijakan BLT Migor

KELANGKAAN minyak goreng yang dirasakan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini direspon pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng (BLT Migor). BLT diberikan sebesar Rp 300.000 selama tiga bulan (April-Juni 2022) dan ditujukan kepada 20,5 juta keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan. Kebijakan ini tentunya patut diapresiasi dan menunjukkan keberpihakan pemerintah untuk melindungi masyarakat yang terdampak kelangkaan migor.

Namun demikian, ada beberapa hal yang patut menjadi analisis kritis di dalam kebijakan tersebut. Pertama, sejauhmana ketepatan sasaran program tersebut? Kedua, sejauhmana program ini mampu memberikan solusi atas dampak kelangkaan minyak goreng?

Ketepatan Sasaran
Persoalan ketepatan sasaran merupakan hal yang selalu muncul di dalam setiap pemberian bantuan sosial pemerintah. Karenanya, sebelum dana bantuan dicairkan perlu ada *updating* data sehingga mereka yang menerima bantuan benar-benar tepat sasaran. Kriteria penerima PKL yang berjualan gorengan ini pun perlu lebih dijelaskan secara detail sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat bawah. Misalnya apakah kriteria pedagang gorengan ini mencakup juga pedagang-pedagang warteg, pedagang angkringan atau spesifik pedagang gorengan? Kemudian berapa usia usaha, skala usaha dan sebagainya. Dari sisi penerima manfaat pun perlu ada pengawasan, apakah bantuan sosial ini juga benar-benar dialokasikan untuk membantu dampak kelangkaan migor ini atau hanya untuk kepentingan konsumtif.

Jika ini tidak diantisipasi, program ini

Hempri Suyatna

justru akan sangat rentan menimbulkan gejolak di masyarakat. Pendek kata, pelaksanaan program ini jangan sampai hanya sekedar mengejar target kuantitatif semata. Akan tetapi secara substantif program ini harus benar-benar menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan. Sebenarnya akan lebih baik jika memang tiga bulan ke depan program ini masih ada, program bantuan sosial bisa diarahkan dengan memberikan subsidi minyak goreng kemas/curah kepada para penerima bantuan sosial.

Sedangkan berkaitan dengan kemampuan mengatasi solusi, kebijakan ini seharusnya bukan menjadi satu-satunya kebijakan pemerintah di dalam mengatasi dampak kelangkaan harga minyak goreng. Pemerintah harus tetap konsisten untuk mengawal agar tata niaga minyak goreng dan minyak curah bisa terkendali di pasar karena inilah yang sebenarnya menjadi akar permasalahan dari kelangkaan migor selama ini.

Pemberian subsidi terhadap minyak goreng curah beberapa waktu lalu ternyata juga tidak benar-benar menyelesaikan permasalahan karena ketersediaan minyak goreng curah ini juga masih langka di pasar. Padahal sudah muncul Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomer 8 Tahun 2022 yang mewajibkan 81 perusahaan minyak goreng menyediakan minyak curah untuk kebutuhan masyarakat dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini mengindikasikan masih ada persoalan distribusi/mata rantai perdagangan minyak goreng, yang belum benar-benar diselesaikan secara tuntas.

Akar Permasalahan
Kebijakan yang dilakukan harusnya

menyentuh akar permasalahan kelangkaan migor ini yakni dengan melakukan pembenahan jalur distribusi dari hulu sampai ke hilir. Dari aspek hulu, pemerintah dengan otoritas yang dimiliki perlu benar-benar menegakkan aturan terkait kewajiban industri pengeksport minyak sawit mentah untuk mengalokasikan penjualan ke dalam negeri sebesar 30%. Kemudian, mata rantai distribusi perdagangan juga harus diawasi sehingga tidak muncul berbagai bentuk penimbunan migor. Penegakan hukum harus benar-benar ditegakkan.

Dua strategi di atas (pengawasan terhadap BLT Migor dan pengawasan tata niaga) harus dilakukan secara paralel. Ini perlu benar-benar dioptimalkan. Agar rakyat semakin tidak menderita akibat kenaikan sembako yang dipastikan naik di awal Bulan Ramadan dan menjelang lebaran nanti. □

**) Dr Hempri Suyatna, Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PsdK) Fisipol UGM*

Pojok KR

Kapolda: segera tangkap pelaku 'klithih'.

-- Lebih cepat lebih baik!

Menteri dilarang bicara tunda Pemilu lagi.

-- Jadi, biar berjalan sesuai agenda.

Ramadan, jangan lupa tunaikan zakat.

-- Mumpung kesaduran beragama tinggi.

Beraba

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Sekolah, Memulai Dari Nol Lagi

RASANYA tak terasa sudah 2 tahun pendidikan kita terdampak. Gara-gara Pandemi Covid-19, mengubah semua tata cara. Selama kurun waktu tersebut dunia pendidikan dipaksa, untuk mengikuti kebiasaan sekolah dalam jaringan. Maka yang terasa sekarang, bukan hanya kualitas pendidikan kita yang menurun, saya merasakan karakter dan mental anak didik juga mengalami degradasi.

Sehingga ketika PTM akan dilaksanakan total, maka sekolah harus memulai dari nol, padahal selama ini sudah membangun norma atau perilaku siswa. Disiplin yang awalnya telah dibangun dunia pendidikan, kini agak memudarat lantaran jarang bertemu. Kita tidak tahu ketika pelajaran menggunakan aplikasi zoom, ketika guru sedang menerangkan pelajaran.

Ritanisih Sujoko, MTsN 6 Bantul.

Citra Yoga Aman Tercoreng Klithih

SEBAGAI pendidik dan sekaligus orangtua murid, saya betul-betul prihatin dan syok pada kelakuan remaja-remaja Yoga dengan aksi kejahatan jalanan. Malam-malam di saat kita tidur nyenyak, mereka 'klithih' keluyuran membawa pedang, atau senjata apa saja dengan tujuan ingin melukai, bahkan membunuh.

minuman keras. Dan kejadian ini berulang-ulang. Saya tidak tahu kenapa mereka bila lolos dari aparat keamanan. Apa karena patroli keamanan kurang? Karena itu, patroli harus ditingkatkan. Meski terlihat aman, nyatanya aksi teror untuk Yoga masih berlanjut.

Orangtua salah satu murid saya dari luar Jawa telepon, menyatakan ketakutannya karena anaknya sekolah di SMA Yoga. Dia ingin memindah anaknya untuk sekolah di kota yang lebih aman. Artinya, citra kota Yoga yang aman dan nyaman untuk pendidikan telah tercoreng. □

Sri Hardono, Sardonocharjo, Sleman.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019).
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYoga - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lempersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujijanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.